



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN
NOMOR : KEP-42/L.9.15/Cp.1/4/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan perlu mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN.



- KESATU : Menetapkan Penetapan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan;
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periode setiap enam bulan;
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 03 April 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA SELATAN,



RIAMA BR SIHITE, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 19661003 199303 2 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Arsip.

